

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Telp. 073621585 Fax. 073621585

Bengkulu - Bengkulu 38225

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bengkulu, 15 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

ENDRI NOVIAN, S.E.
NIP. 197511092003121001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu.....	23
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
A.3. Basis Akuntansi	24
A.4. Dasar Pengukuran	24
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	37
C.1. Aset Lancar.....	37
C.2. Aset Tetap	38
C.3. Kewajiban Jangka Pendek.....	42
C.4. Ekuitas.....	43
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	43
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	43
D.2. Beban Pegawai	44
D.3. Beban Persediaan	44

D.4.	Beban Barang &Jasa.....	45
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	45
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	46
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	46
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	47
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	48
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	49
D.11.	Beban Lain-lain.....	49
D.12.	Kegiatan Non Operasional	50
D.13.	Pos Luar Biasa	50
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	50
E.1.	Ekuitas Awal.....	51
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	51
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	51
E.4.	Koreksi Menambah dan Mengurangi	51
E.5.	Transaksi Antar Entitas.....	53
E.6.	Ekuitas Akhir.....	55
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	56
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	56
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	56
	Laporan-laporan Pendukung.....	59
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	60
	Informasi Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa	62

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2019 dan 2018	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	27
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat Aset Tetap	30
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	33
Tabel 6 Perubahan DIPA.....	33
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2019.....	33
Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2019 dan 2018.....	34
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019	34
Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019.....	35
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	35
Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018	36
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018	37
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	37
Tabel 15 Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.....	38
Tabel 16 Rincian Aset Tetap	38
Tabel 17 Rincian Saldo Tanah	39
Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	42
Tabel 19 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018.....	43
Tabel 20 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2019.....	44
Tabel 21 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	45
Tabel 22 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	45
Tabel 23 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	46
Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	46
Tabel 25 Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2019.....	47
Tabel 26 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	48
Tabel 27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	49
Tabel 28 Rincian Beban Piutang Tak Tertagih per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	49
Tabel 29 Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	50
Tabel 30 Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	50
Tabel 31 Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018.....	51
Tabel 32 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember TA 2019.....	54
Tabel 33 Rincian Koreksi Aset Tetap non Revaluasi per 31 Desember TA 2019.....	53
Tabel 34 Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember TA 2019.....	54
Tabel 35 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember TA 2019.....	54
Tabel 36 Rincian Transfer Masuk.....	55
Tabel 37 Rincian Pengesahan Hibah.....	56

*PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB*

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585 E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, 15 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

ENDRI NOVIAN, S.E.
NIP. 197511092003121001



RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.730.000 atau mencapai 97 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.750.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp.126.154.500 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.127.939.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019			TA 2018
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	750.000	730.000	97	395.000
Belanja Negara	127.939.000	127.939.000	99	143.256.400

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 2018 .

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.80.802.220, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 80.802.220; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0. yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0. dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.80.802.220, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 80.802.220 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2019	2018	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	80.802.220	90.051.208	(9.248.988)	(10,27)
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	80.802.220	90.051.208	(9.248.988)	(10,27)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	80.802.220	90.051.208	(9.248.988)	(10,27)
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	80.802.220	90.051.208	80.372.408	830,39
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	80.802.220	90.051.208	(9.248.988)	(10,27)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasional, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.730.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.123.726.176 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(122.996.176).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.(733.100) dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(123.769.276).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 90.051.208,-, dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(123.769.276) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.114.520.288 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp.80.802.220.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	750.000	730.000	97	395.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		750.000	730.000	97	395.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	127.939.000	126.154.500	99	143.256.400
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		127.939.000	126.154.500	99	143.256.400

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NERACA
PER 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	80.802.220	90.051.208
Jumlah Aset Lancar		80.802.220	90.051.208
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		80.802.220	90.051.208
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.3		
Uang Muka dari KPPN	C.3. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.4	80.802.220	90.051.208
Jumlah Ekuitas Dana		80.802.220	90.051.208

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana**80.802.220****9.678.800**

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	730.000	395.000
Jumlah Pendapatan		730.000	395.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	47.626.176	41.749.175
Beban Barang dan Jasa	D. 4	19.450.000	11.727.400
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	56.650.000	74.924.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		123.726.176	128.401.075
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(122.996.176)	(128.006.075)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(773.100)	432.250
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(773.100)	432.250

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(123.769.276)	(127.573.825)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E. 1	90.051.208	9.678.800
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(123.769.276)	(127.573.825)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	E. 3	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E. 4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0	73.200.381
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 4.5	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 5	114.520.288	207.946.233
Ekuitas Akhir	E. 6	90.051.208	90.051.208

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	750.000	750.000
Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah	750.000	750.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	161.910.000	127.939.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	161.910.000	127.939.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
730.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.730.000 atau mencapai 329,16 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.750.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	750.000	730.000	97
2.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0,00
Total Pendapatan		750.000	730.000	97

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.730.000 atau mencapai 99 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.750.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	730.000	395.000	335.000	84,81
2.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		730.000	395.000	(145.000)	(26,85)

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
:
Rp.126.154.500*

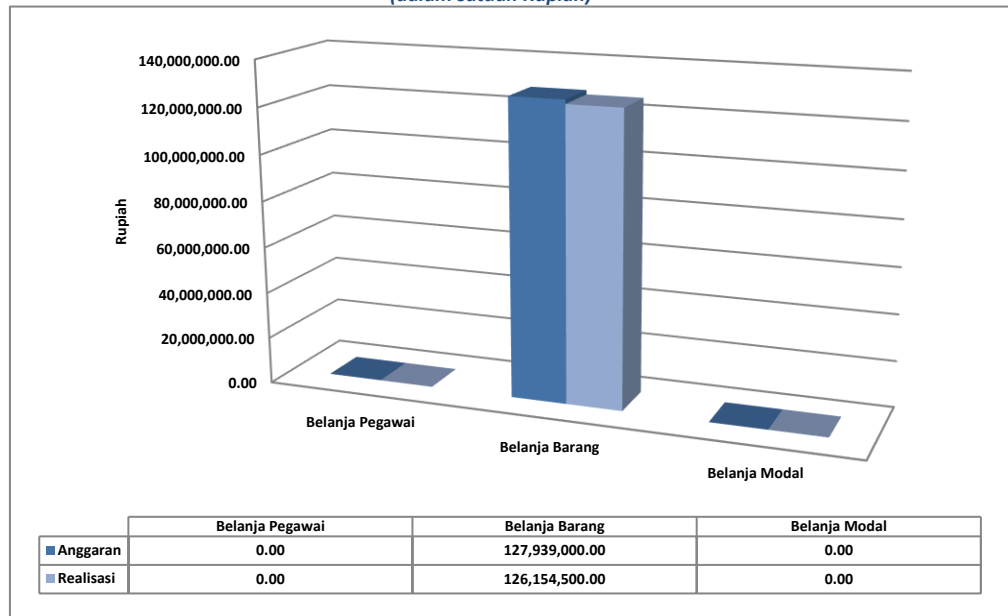
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp.126.154.500 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99% dari anggaran senilai Rp.127.939.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	127.939.000	126.154.500	99
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	127.939.000	126.154.500	99
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	151.976.000	143.256.400	94,26

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2019 & 2018

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar 11,94% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya anggaran Belanja Barang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	126.154.500	143.256.400	(17.101.900)	(11,94)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	126.154.500	143.256.400	(17.101.900)	(11,94)

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang*
:
Rp.126.154.500

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.126.154.500 dan Rp.143.256.400.

Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar 11,94% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya anggaran Belanja Barang pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	8.444.000	10.650.500	(2.206.500)	(20,71)
Belanja Barang Non Operasional	11.006.000	1.076.900	9.929.100	922,01
Belanja Barang Persediaan	50.054.500	56.605.000	(6.550.500)	(11,57)
Belanja Perjalanan Dinas	56.650.000	74.924.000	(18.274.000)	(24,39)
Total Belanja Brutto	126.154.500	143.256.400	17.101.900	(11,94)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	126.154.500	143.256.400	17.101.900	(11,94)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp.80.802.220

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.80.802.220 dan Rp. 90.051.208. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	80.802.220	90.051.208
Total Aset Lancar	80.802.220	90.051.208

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2018
1.	Uang Muka dari KPPN	0	0
	Jumlah	0	0

Kas di Bendahara Pengeluaran pada periode 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0.

C.1.2. Persediaan

Persediaan:
Rp.80.802.220

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar

Rp.80.802.220 dan Rp. 90.051.208. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1 Barang Konsumsi	80.802.220	90.051.208
2 Amunisi	0	0
3 Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4 Suku Cadang	0	0
5 Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6 Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7 Bahan Baku	0	0
8 Barang dalam Proses	0	0
9 Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10 Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11 Persediaan lainnya	0	0
Total	80.802.220	90.051.208

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
	-	-	-	-	-	-
	Jumlah					0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	0

Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019

- 0 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan :*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing

Rp. 0 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap : Rp.
0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 0.*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.3.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.4. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp.80.802.220*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.80.802.220 dan Rp. 90.051.208. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP :
Rp.730.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.730.000 dan Rp. 395.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 20 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	750.000	730.000	97
2.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Total Pendapatan		750.000	730.000	97

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp.47.626.176*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.47.626.176 dan Rp. 41.749.675. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	47.626.176	41.749.675	5.876.501	14,08
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku	0	0	0	0

Cadang

Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	47.626.176	41.749.675	5.876.501	14,08

D.4. Beban Barang & Jasa

*Beban Barang &
Jasa :
Rp.19.450.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.19.450.000 dan Rp. 11.727.400. Beban Barang & Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Beban Barang & Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Honor Operasional Satker	0	3.450.000	(3.450.000)	(100)
Beban Bahan	11.006.000	1.076.900	9.929.100	922,01
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	8.444.000	7.200.500	1.243.500	17,27
Pusat				
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Jasa	19.450.000	11.727.400	7.722.600	65,85

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.56.650.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.56.650.000 dan Rp.74.924.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	56.650.000	74.924.000	(18.274.000)	(24,39)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0,00
Total Beban Perjalanan Dinas	56.650.000	74.924.000	(18.274.000)	(24,39)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi

berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0

Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0

Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.432.250

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(773.100)	432.250	(1.205.350)	(278,86)
Total Surplus (defisit) dari kegiatan Non Operasional	(773.100)	432.250	(1.205.350)	(278,86)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp.90.051.208 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.90.051.208 dan Rp. 9.678.800.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp.(123.769.276) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.(123.769.276) dan Rp.(127.573.825). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan mendasar : Rp.0. Tidak terdapat transaksi dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

E.4. Koreksi Menambah dan Mengurangi

E.4.1.Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp.0. Nilai Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2.Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp.0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 32 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan	0
Lainnya	
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3.Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap : Rp.0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

E.4.4.Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi: Rp.0

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

Tabel 33 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp.0.

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi antar beban, koreksi antar hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0.

Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 34 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Utang	0
Koreksi Hibah	0
Total Koreksi Lain-lain	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas :*
Rp.114.520.288

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.114.520.288 dan Rp.207.946.233 .

Rincian Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 35 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	126.154.500
Diterima dari Entitas Lain	(730.000)
Transfer Keluar	54.656.052
Transfer Masuk	(43.751.840)
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	114.520.288

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp.(730.000), sedangkan DKEL sebesar Rp.126.154.500.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.43.751.840 terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Transfer Masuk
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
Buku-Buku Register	Dirjen Badilum MARI	43.751.840
Jumlah		43.751.840

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.54.656.052.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Pengesahan Hibah

(dalam satuan Rupiah)

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
--	--	0
--	--	0
	Total Pengesahan	0
	Pengesahan Pengembalian Hibah	0
	Jumlah	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran.

E.6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp.80.802.220.*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.80.802.220 dan Rp.90.051.208 .

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu dijelaskan pada Tahun Anggaran 2019 ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat pendapatan dan belanja akrual yang perlu dijelaskan pada Tahun Anggaran 2019 ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

1. BRI Cabang Bengkulu A/C 0115-01-001696-30-6 an. RPL 016 PT BENGKULU yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.450.000.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) : S-3825/MK.5/2015 tanggal 11 Mei 2015.

2. BRI Cabang Bengkulu A/C 0115-01-002518-30-7 an. BPG 016 Pengadilan Tinggi Bengkulu yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.

Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) dari KPPN : S-127/WPB.09/KP.016/2015 Tanggal 28 Januari 2015.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu biaya yang terlebih dahulu harus dibayar oleh penggugat ketika memasukkan gugatan perkara perdata, sesuai dengan asas tidak ada biaya, tidak ada perkara. Biaya perkara pada saat putusan akhir dibebankan kepada pihak yang kalah. Sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah biaya perkara di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.450.000.
2. Biaya Konsinyasi yaitu atau yang dikenal dengan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan dan penitipan. Sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah biaya konsinyasi di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.0.
3. Biaya Eksekusi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang menang dalam suatu perkara perdata terkait perkara bangunan atau tanah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah biaya konsinyasi di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar Rp.0.
4. Biaya Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.0

F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

Revisi DIPA ke-1 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang Tanggal 28 Maret 2019.

Revisi DIPA ke-2 Halaman ke III DIPA Rencana Penarikan Dana Tanggal 24 Juni 2019.

Revisi DIPA ke-3 tanggal 28 Agustus 2019.

Revisi DIPA ke-4 tanggal 17 Oktober 2019.

Revisi DIPA ke-5 Halaman ke III DIPA Rencana Penarikan Dana tanggal 19 November 2019.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB per 31 Desember 2019 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 799/SEK/Kp.ISK/X/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Persadilan di Bawahnya.

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Umi Kalsum, S.Sos

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Endri Novian, SE

2. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : W8-U/2385/KP.01.3/10/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Petugas Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Semula :

Pejabat Pembuat Komitmen : Linda Nora, S.Kom, SH

Menjadi :

Pejabat Pembuat Komitmen : Umi Kalsum, S.Sos

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI
BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tinggi Bengkulu

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0

B. INFORMASI HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan
1.	-	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0
4.	-	0	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0